

## **Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan Dan Distribusi Pendapatan Di Kota Medan**

**Kamilah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
kamila@uinsu.ac.id

**Annio Indah Lestari Nst**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
annionst@gmail.com

### ***Abstract***

Medan City has just been chosen as the winner for the category of the Best City of Indonesia in 2017 and the Best City of the Sumatra Region. This shows the city's great potential in an effort to attract investors from various industries and business people as well as to advance the regional economy. However, the poverty rate in Medan among other cities in North Sumatra has increased continuously. As a result, the economic condition of the community in general has not reached the same level of income equity and deficiencies are still found, including the gap between regions in achieving economic levels. The abundance of research and scientific studies carried out in depth on the system originating from Islamic teachings, which proved to remain strong in the face of the crisis that came crashing, starting in 1998 and 2008 to the present. The purpose of this study is to look deeply into the role of the industry of Islamic microfinance institutions in overcoming the problem of social inequality and income distribution in Medan. This research method uses a qualitative descriptive method by means of case studies. The object of the research conducted in this study is the Role of the Industry of Sharia Microfinance Institutions in Medan City, while the subjects of this study are Practitioners, Employees of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) and Customers of Islamic Microfinance Institutions (LKMS). The results of this study found that LKMS Madani Emas Syari'ah has shown a fairly good role in its efforts to overcome the problem of social inequality, this was shown in an effort to help the capital of small and medium enterprises in Medan so that the business can continue despite limited funds, capital and resources. Even so, the role that is owned is not significant because in terms of the age of the newly established and only one LKMS that stands under the supervision of OJK in Medan City.

**Keywords:** Sharia Microfinance Institutions, Gaps, Role of Industry, Poverty, Income Distribution

### **Pendahuluan**

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat pada saat ini, tentunya juga berdampak pada perkembangan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah. Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendorong

perekonomian rakyat sangat melekat pada Grameen Bank di Bank di Bangladesh, yang berdiri pada tahun 1976. Pemberian akses pembiayaan mikro yang luas kepada perekonomian rakyat tersebut, bahkan telah dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan (Pratiwi, 2014: 85).

Di Indonesia ada beberapa contoh lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain. Selain bank syariah saat ini juga banyak didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Bank Perkreditan Rakyat syariah, Baitul Mall Wattamwil (BMT) dan koperasi berbasis syariah. Di dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), koperasi syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun koperasi syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari pada yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberikan pengertian bahwa lembaga keuangan adalah “badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat”

Lembaga Keuangan Mikro sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lampau. Namun dalam prakteknya, seringkali ditemui pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan syariah, misalnya terdapat praktik pembungaan uang (ribawi), praktik *gharar*, dan lain sebagainya. Namun belakangan ini, masyarakat internasional maupun Indonesia khususnya mengalami peningkatan “*religiosity*”, semangat keagamaan (Harahap, Sofyan Syafri, 2004). Fenomena ini benar adanya, jika kita amati ternyata sekarang ini perkembangan di masyarakat internasional, beberapa universitas Barat telah banyak membuka pusat studi Islam, di Eropa, di USA, Islam semakin tampak, di Inggris, Belanda bahkan dalam bidang politik, kekuatan Islam semakin diperhitungkan. Kajian mengenai Islam semakin banyak, seminar, symposium, mass media, literature semakin menjamur. Di Singapura, misalnya pemerintah harus menyediakan makanan halal dan barang halal untuk konsumsi umat Islam, kalau tidak maka dikhawatirkan pemasukan dari sektor pariwisata menurun dan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi, tolak ukur keberhasilan pembangunan juga dilihat dari struktur ekonomi dan kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan juga antar sektor. Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa untuk

meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*

Distribusi yang tidak merata menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Chalil, Zaki Fuad, 2009: 17-23).

Sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki perangkat yang berpotensi mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan. Sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki perangkat yang berpotensi mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan. Namun, masih ada beberapa hal yang dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mengoptimalkannya.

Ukuran keberhasilan perekonomian salah satunya diukur melalui Pendapatan Domestic Bruto (PDB) atau PDRB untuk perekonomian daerah baik atas dasar konstan maupun atas dasar harga berlaku. Semakin tinggi PDRB maka semakin sejahteralah masyarakat. Namun tentu saja kesejahteraan yang dimaksud hanya tercapai jika PDRB yang besar tersebut dinikmati oleh semua anggota masyarakat dan bukan hanya segelintir orang atau kelompok.

Berdasarkan fenomena ini, semakin banyak bermunculan lembaga keuangan syariah umumnya maupun lembaga keuangan mikro syariah pada khususnya. Untuk ini maka sangat diperlukan peran industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengatasi masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan di

Kota Medan. Hal ini menjadi sangat penting sehingga lembaga keuangan mikro syariah ini tidak hanya memiliki label syariah namun benar-benar telah mengaplikasikan sistem keuangan secara syariah dan dapat menjadi contoh di masyarakat.

Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menarik minat investor tidak hanya tergantung pada kemampuannya untuk memperoleh laba secara finansial saja, namun juga tergantung pada persepsi bahwa lembaga tersebut benar-benar menerapkan aspek syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Kota Medan baru-baru ini terpilih sebagai pemenang untuk kategori Kota Terbaik Indonesia 2017 dan Kota Terbaik Per Region Sumatera. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar kota ini dalam upaya menarik minat investor dari berbagai industri dan pelaku bisnis serta memajukan perekonomian daerah. Dalam melakukan penilaian, ada dua indikator yang digunakan, yakni kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap PDRB Provinsi di atas 20%, sedangkan indikator kedua yakni pertumbuhan PDRB harus lebih besar dari rata-rata pertumbuhan koridor atau PDRB per kapita lebih besar dari rata-rata PDRB per kapita koridor.

**Tabel 1 Garis Kemiskinan se-Sumatera Utara 2014-2016**

<b>Kabupaten Kota</b>	<b>Garis Kemiskinan</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Nias	280,008	287,527	330,111
Mandailing Natal	268,034	280,506	304,669
Tapanuli Selatan	293,441	300,449	326,321
Tapanuli Tengah	298,573	307,710	353,753
Tapanuli Utara	283,464	291,893	325,606
Toba Samosir	282,744	292,695	326,501
Labuhan Batu	289,625	298,650	333,144
Asahan	254,253	262,464	292,030
Simalungun	274,867	283,234	315,947
Dairi	255,130	263,359	293,666
Karo	343,225	357,954	400,261

Deli Serdang	293,551	304,183	347,030
Langkat	294,175	304,825	348,205
Nias Selatan	215,835	220,455	238,119
Humbang Hasundutan	254,633	262,317	301,663
Pakpak Bharat	212,009	217,919	248,835
Samosir	235,355	242,263	271,619
Serdang Bedagai	291,732	301,639	336,478
Batu Bara	310,494	320,422	347,533
Padang Lawas Utara	246,951	256,219	278,290
Padang Lawas	240,131	247,594	268,922
Labuhanbatu Selatan	294,334	304,632	330,874
Labuanbatu Utara	321,487	332,815	361,017
Nias Utara	316,674	326,303	370,371
Nias Barat	299,555	307,907	352,570
Sibolga	342,384	355,225	391,681
Tanjungbalai	311,787	322,324	345,900
Pematangsiantar	387,899	403,918	429,365
Tebing Tinggi	342,964	355,621	383,650
Medan	401,417	420,208	460,685
Binjai	310,384	322,091	343,078
Padangsidempuan	304,508	315,547	326,579
Gunungsitoli	288,112	289,428	304,727
Sumatera Utara	318,398	347,953	388,156

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Sementara pada tabel 1 di atas, akan terlihat bahwa angka kemiskinan di kota Medan di antara kota-kota lain di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan secara terus menerus. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya kesenjangan antar wilayah dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Banyaknya penelitian dan kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam terhadap sistem yang bersumber dari ajaran Islam ini, dimana terbukti tetap tangguh menghadapi krisis yang datang menghempas, mulai tahun 1998 maupun 2008 hingga masa sekarang ini.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah yang dibuktikan secara alamiah untuk memperoleh data dan untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni merupakan kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa tertentu, atau dengan kata lain, studi kasus merupakan penelitian intensif tentang seseorang atau suatu unit sosial yang kecil seperti keluarga, kelompok, dan lain-lain. Unit sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Medan. Karakteristik penelitian studi kasus pada umumnya sama dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu menggali substansi mendasar di balik fakta yang terjadi di dunia. Studi kasus ini merupakan penelitian mengenai manusia (yang berada di lingkungan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Medan). Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Medan. Sedangkan subjek penelitiannya merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya untuk mendapatkan keterangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

Untuk penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Maka subjek dari penelitian ini adalah Praktisi, Karyawan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dengan jumlah informan 2 orang praktisi, 3 orang karyawan LKMS dan 3 orang nasabah LKMS.

## **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

Salah satu fokus utama Lembaga Keuangan saat ini adalah bertumpu pada pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) syariah juga mendapat perhatian yang cukup signifikan. bahwa konsisten dalam mengembangkan LKM syariah ini akan menjadi salah satu jalan yang efektif untuk mengulang *golden period* (masa keemasan) yang pernah ada pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu lembaga amil zakat dan lembaga social lainnya mengalami kesulitan dalam pendistribusian harta yang terkumpul pada masyarakat. Masyarakat sudah sangat sejahtera dengan terpenuhinya berbagai macam kebutuhan mereka, seperti kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan kebebasan mengungkapkan pendapat, dan lain-lain. Sebuah mimpi yang harus kita wujudkan menjadi kenyataan. Ke depan. Peran LKM syariah akan semakin bersifat strategis dan penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian nasional

### **2. Perkembangan LKM Syariah**

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah terutama dalam satu dasawarsa terakhir, baik dari jumlah lembaga maupun jumlah nasabah, menunjukkan angka yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi melalui lembaga keuangan ini untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Bahkan diprediksi bahwa LKM akan memiliki peran strategis dalam mengakselerasi proses Indonesia menjadi Negara maju pada tahun 2030 mendatang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Chairul Tanjung, pengusaha yang juga Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), dalam ceramahnya pada peringatan Dies Natalis Ke-47 Institut Pertanian Bogor (IPB). Beliau berkeyakinan bahwa Indonesia akan masuk dalam lima terbesar *developed country* pada 2030 nanti dengan LKM menjadi salah satu pilar utamanya.

Program pengentasan kemiskinan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesungguhnya telah dilaksanakan dibanyak Negara berkembang. Program ini merupakan saran untuk membantu pengusaha kecil-menengah dalam membiayai investasi untuk kegiatan ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal, pengeluaran konsumsi, dan memungkinkan para *erbeitlos* (pengangguran) untuk berwirausaha ketika peluang upah di sector formal ekonomi terbatas. Bahkan PBB secara tegas menyatakan bahwa tahun 2005 lalu sebagai

permulaan tahun internasional bagi Lembaga Keuangan Mikro, yang mengakui bahwa lembaga ini merupakan sarana penting mengurangi kemiskinan di dunia.

Dalam konsep Islam, Negara manapun yang memiliki *goal* yang jelas, yakni terbentuknya tatanan masyarakat yang sejahtera sebagaimana disampaikan Imam al Syatibi dalam karyanya *al muwafaqat fii al ushul*, akan berusaha dengan konsisten mencari dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan sesuai dengan karakter bangsa. *Islamic Micro-finance* yang di dalamnya ada BMT, Koperasi Syariah, BPRS, serta bank-bank Islam dengan unit usaha mikronya diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan tersebut.

### 3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Madani Emas Nusantara

Adapun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ada di Kota Medan, sampai saat ini baru berjumlah 1 (satu) buah LKMS, yakni LKMS Madani Emas Nusantara yang saat ini berlokasi di Jl. Kapt. Muslim Kompleks Ruko Metro Bisnis Centre No. 5 Medan. Pada awalnya, lembaga ini didirikan dengan niat mulia, untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah yang memiliki usaha namun kesulitan untuk memperoleh akses ke dunia perbankan. (*non bankable*). Selain itu, LKMS ingin turut berperan dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat dan usaha mendidik masyarakat dalam berbisnis yang islami dan jauh dari jeratan rentenir dan ribawi.

Adapun hasil penelitian ini, diperoleh data berupa jumlah pembiayaan yang sudah disalurkan kepada masyarakat, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018, pada tabel berikut ini:

Adapun Sumber Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2. Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Profesi
1	Rusdiono, MM	Praktisi, Direktur BMT, Pengelola LKMS Madani Emas Nusantara
2	Dian Yustriawan, MM	Praktisi, Ka. Pusat Pengembangan Manajemen
3	Jaka Kirmansyah	Manager LKMS
4	Novita Sari	Karyawan LKMS (Account Officer)
5	Pita Sari	Karyawan LKMS (Teller)
6	Endang Susilawati	Nasabah LKMS (Pedagang Desain)



7	Siti Nurbaya	Nasabah LKMS (Pedagang Kelapa)
8	Herman Yosef	Nasabah LKMS (Pedagang Kempul)

Sumber: Doc. Peneliti

#### 4. Struktur Organisasi LKMS Madani Emas Nusantara

Adapun Struktur Organisasi LKMS Madani Emas Nusantara ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. RUPS/ RAT (Rapat anggota Tahunan)

Musyawarah ini dilaksanakan setiap tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karenanya berhak memutuskan:

- Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi;
- Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen;
- Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun;
- Penetapan visi dan misi organisasi;
- Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya;
- Pengesahan rencana program kerja tahunan

##### b. Dewan Komisaris/Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk.
- 2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.
- 3) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

##### c. Direktur Utama/ Ketua Pengurus

Fungsi Utama Jabatan

Melakukan control/ pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.

- 1) Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan unit BMT Mirla kepada seluruh anggota mekanisme rapat yang disepakati.
- 2) Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Karyawan.
- 3) Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di BMT.
- 4) Terjaganya kondisi kerja yang aman,nyaman di BMT
- 5) Terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak- pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha BMT
- 6) Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya.
- 7) Meningkatkan kualitas SDM BMT.

**d. Manager**

- Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya ia yang paling bertanggungjawab terhadap operasional BMT;
- Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan;
- Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan;
- Ia juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan;
- Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu minimal enam bulan sekali.

**e. Account Officer (AO)**

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisi kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan Tanggung Jawab

- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya

- 2) Memastikan analisi pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
- 3) terselesaikannya pembiayaan bermasalah
- 4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- 5) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar

**f. Tugas-tugas Pokok**

- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya
- 2) Memastikan analisi pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
- 3) terselesaikannya Pembiayaan Bermasalah
- 4) Melihat Peluang Dan Potensi Pasar Yang Ada Dalam Upaya Pengembangan Pasar
- 5) Melakukan Monitoring Atas Ketepatan Alokasi Dana Serta Ketepatan Angsuran Pembiayaan Mitra

**g. Bagian Administrasi**

Bagi organisasi yang sudah membentuk dapat membentuk unit administrasi tersendiri yang meliputi:

- Bagian administrasi pembiayaan, dan bagian administrasi tabungan.
- Bagian administrasi pembiayaan akan berfungsi menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi pembiayaan, dokumentasi, serta informasi berbagai hal tentang kondisi pembiayaan tersebut. Ia juga berfungsi mencatat angsuran supaya sesuai antara kartu angsuran yang dibawa nasabah /anggota dengan catatan BMT.
- Bagian administrasi tabungan akan berperan dalam penyiapan buku tabungan bagi anggota baru, pencatatan saldo pada kartu monitoring, pemindahbukuan bagi hasil, serta catatan atas perilaku anggota penabung termasuk jadwal pengambilan tabungan dan informasi deposito jatuh tempo dan pengambilan tabungan besar

**h. Teller**

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

Tanggung Jawab:

- Terselesaikannya laporan kas harian
- Terjaganya keamanan kas
- Tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

Tugas-Tugas Pokok

- 1) Terselesaikannya laporan kas harian.
  - Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang
  - Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
  - Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
  - Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
  - Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
- 2) Terjaganya keamanan kas
  - Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
  - Meneliti setiap ruang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
  - Menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan.
  - Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
  - Melakukan cross check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas.
- 3) Tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
  - Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.

- Meminta pengesahan laporan cashflow dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.

### **Standar Operating Procedure (SOP) Pengajuan Pembiayaan LKMS Madani Emas Nusantara**

Adapun Standar Operating Procedure (SOP) yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Madani Emas Nusantara ini meliputi SOP Pengajuan Pembiayaan, Analisa Pembiayaan dan Persetujuan Pembiayaan.

#### **Persyaratan Pembiayaan**

1. Marketing menjelaskan produk pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Apakah Pemohon sudah membuka rekening atau belum. Untuk menjadi nasabah Simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan.
2. Nasabah mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya. Syarat permohonan individu:
  - a. KTP suami istri
  - b. Kartu keluarga, surat nikah
  - c. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
  - d. Agungan (BPKB/Sertifikat IMB)
  - e. Data objek pembiayaan
  - f. Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto

#### **Tambahan berkas khusus bagi Pegawai**

- a. Fotokopi SK Pengangkatan menjadi PNS / Pegawai Tetap
- b. Fotokopi Slip Gaji Terbaru ( untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir)
- c. Fotokopi Print Out RekeningTabungan / Rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir

#### **Tambahan berkas khusus bagi Profesional (Dokter, Bidan.**

#### **Perawat):**

- Fotokopi Surat Ijin Praktek yang masih berlaku
- Laporan Keuangan Praktek ( Pendapatan & Pengeluaran) minimal 3 bulan terakhir
- Fotokopi Data Kunjungan Pasien minimal 3 bulan terakhir

- Fotokopi Print Out Rekening Tabungan/ Giro untuk perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir

**Tambahan berkas khusus bagi Wiraswasta:**

- Fotokopi Surat Ijin Usaha Lengkap ( SIUP, TDP, Akta Badan Usaha, NPWP Badan Usaha )
  - (Ijin Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun )
  - Laporan Keuangan Usaha ( Neraca & Rugi – Laba ) periode 2 tahun terakhir
  - Fotokopi Print Out Rekening Tabungan / Giro perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir
3. Marketing meminta form permohonan pembiayaan dan melayani , memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya ).
  4. Marketing menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya. Marketing mensimulasikan Kartu Angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah dengan menggunakan system
  5. Marketing mengirimkan form yang telah lengkap ke bagian Manajer Mengisi data calon nasabah pembiayaan ke system, status pembiayaan adalah pengajuan. Selanjutnya Manajer akan mempersiapkan berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan
  6. Manajer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan , Map pembiayaan dikembalikan ke Marketing jika belum lengkap secara administrasi.

**Analisa Pembiayaan**

1. Manajer melakukan analisa awal untuk penentuan calon nasabah yang potensial. Nasabah potensial berasal dari: a. Nasabah pembiayaan yang sudah mengajukan permohonan (lihat prosedur pengajuan pembiayaan) b. Petugas Koperasi yang melihat usaha-usaha nasabah yang potensial untuk dikembangkan Informasi nasabah potensial diperoleh dari pengecekan intern dari profile database nasabah Koperasi di system, maupun dari data extern seperti : referensi, customer nasabah maupun supplier.

2. Surveyor melakukan kunjungan ke usaha calon nasabah pembiayaan (nasabah potensial).

Informasi yang dikumpulkan:

- Data usaha Filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, para pendiri, pemegang saham, jumlah karyawan,
- Kemampuan membayar
- Barang yang akan digunakan sebagai agunan.

### **Peran LKMS dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan dan Masalah Distribusi Pendapatan di Kota Medan**

Adapun tingkat kesenjangan di Kota Medan ini sudah harus mendapatkan perhatian yang signifikan. Jika ditanyakan, bahwa apakah industry lembaga keuangan mikro syariah di Kota Medan memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan di kota Medan? Maka, jawabannya adalah Ya, namun peran yang dimiliki belum signifikan sebab dari segi usia yang masih baru berdiri dan baru satu satunya LKMS yang berdiri di bawah pengawasan OJK di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh data berupa jumlah pembiayaan yang sudah disalurkan kepada masyarakat, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan September 2018, pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3 Jumlah data pembiayaan murabahah LKMS Madani Emas Nusantara yang sudah disalurkan (bulan Januari s/d September 2018)**

No.	Bulan (tahun 2018)	Jumlah Pembiayaan (Rp)
1	Januari	219,014,166.00
2	Februari	240,622,269.00
3	Maret	260,330,602.00
4	April	256,872,270.00
5	Mei	280,247,270.00
6	Juni	199,872,270.00
7	Juli	266,997,270.00
8	Agustus	351,497,270.00
9	September	448,747,270.00

<b>Total</b>	<b>2,524,200,657.00</b>
--------------	-------------------------

*Sumber: Dokumen perusahaan LKMS Madani Emas Nusantara*

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diperoleh informasi, bahwa LKMS Madani Emas Syariah telah menunjukkan peran yang cukup baik dalam upayanya mengatasi masalah kesenjangan sosial, hal ini diperlihatkan dalam upaya membantu permodalan usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Medan sehingga usaha tersebut dapat tetap berlangsung meskipun memiliki keterbatasan dana, permodalan dan sumber daya. Selain itu, LKMS ini juga telah berupaya untuk mengatasi masalah dalam distribusi pendapatan di masyarakat, dimana terdapat masalah kesulitan bagi usaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya, sementara distribusi pendapatan untuk usaha yang lebih besar memiliki kemudahan memperoleh permodalan melalui kemudahan akses ke dunia perbankan.

Pada tabel 3 di atas terlihat jelas, bahwa pembiayaan murabahah LKMS Madani Emas Nusantara yang sudah disalurkan (bulan Januari s/d September 2018) mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, hal ini merupakan respon positif dari masyarakat terhadap kehadiran dan peran LKMS Madani Emas Syariah ini.

### **Strategi dan Profil Nasabah LKMS Madani Emas Syariah**

Adapun Nasabah yang ada di LKMS Madani Emas Syariah ini dapat diklasifikasikan menjadi nasabah pembiayaan dan nasabah tabungan. Sementara pembiayaan yang dilakukan masih dibatasi kepada pembiayaan skala mikro, sehingga tidak boleh diberikan pembiayaan dalam jumlah yang terlalu besar, sehingga LKMS Madani Emas Nusantara diharapkan dapat melakukan inovasi-inovasi produk dan pelayanan, sehingga dapat bersaing dengan pihak perbankan yang juga memberrikan jasa. Inovasi yang dilakukan sampai saat ini cukup beragam, diantaranya adalah pihak LKMS melakukan pelayanan jasa untuk “menjemput bola”, yang selama ini tidak diperoleh dari perbankan, yakni pihak LKMS bersedia untuk menjemput dana setoran pembayaran hutang nasabah langsung ke tempat usaha nasabah, secara harian, meskipun jumlah dana yang dikutip tidak dalam jumlah besar. Demikian juga dengan nasabah tabungan, dapat dilakukan penjemputan dana tabungan nasabah langsung ke lokasi usaha nasabah. Hal ini merupakan upaya LKMS untuk membantu



nasabah (pemilik usaha) sehingga dapat tetap membayar secara harian tanpa harus bersusah payah datang ke kantor LKMS Madani Emas Nusantara dan meninggalkan usahanya meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini merupakan pelayanan yang dilakukan oleh LKMS dan merupakan nilai plus yang disukai oleh nasabah sehingga mereka tetap loyal membayar tepat waktu secara lancar.

Profil nasabah yang ada pada LKMS Madani Emas Nusantara ini yakni Usaha Kecil Menengah di sekitar Kota Medan, seperti usaha penjualan daging, penjualan kelapa, penjualan kerupuk, dll. Adapun dalam hal pengelolaan keuangan LKMS telah diatur oleh regulasi yang langsung berada di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. LKMS Madani Emas Syariah telah menunjukkan peran yang cukup baik dalam upayanya mengatasi masalah kesenjangan sosial, hal ini diperlihatkan dalam upaya membantu permodalan usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Medan sehingga usaha tersebut dapat tetap berlangsung meskipun memiliki keterbatasan dana, permodalan dan sumber daya. Selain itu, LKMS ini juga telah berupaya untuk mengatasi masalah dalam distribusi pendapatan di masyarakat, dimana terdapat masalah kesulitan bagi usaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya, sementara distribusi pendapatan untuk usaha yang lebih besar memiliki kemudahan memperoleh permodalan melalui kemudahan akses ke dunia perbankan. Meskipun demikian peran yang dimiliki belum signifikan sebab dari segi usia yang masih baru berdiri dan baru satu satunya LKMS yang berdiri di bawah pengawasan OJK di Kota Medan.
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Medan memiliki peran dalam mengatasi masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan di kota Medan. pembiayaan murabahah LKMS Madani Emas Nusantara yang sudah disalurkan (bulan Januari s/d September 2018) mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, hal ini merupakan respon positif dari masyarakat terhadap kehadiran dan peran

LKMS Madani Emas Syariah ini. Nasabah yang ada di LKMS Madani Emas Syariah ini dapat diklasifikasikan menjadi nasabah pembiayaan dan nasabah tabungan . Sementara pembiayaan yang dilakukan masih dibatasi kepada pembiayaan skala mikro, sehingga tidak boleh diberikan pembiayaan dalam jumlah yang terlalu besar

### **Daftar Pustaka**

- Azzad Asset Management. 2009, “Ethical investing: social and financial screens”, available at: [http://azzad.net/new/ethical\\_screens.aspx](http://azzad.net/new/ethical_screens.aspx)
- Baehaqi, A. 2014. “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 1, No. 2, September 2014 Hlm. 119-133
- Bank of Indonesia. 2010. Islamic Banking Statistic January 2010, available at: [www.bi.go.id/web/id/Statistik/StatistikPerbankan/StatistikPerbankanSyariah/](http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/StatistikPerbankan/StatistikPerbankanSyariah/)
- BMT Center, 2009. Press Release BMT Summit 2009: Convincing the Role of BMT in Supporting Small and Medium Enterprises, available at: <http://permodalanbmt.com/?p¼282&lang¼en> (accessed January 30, 2010).
- Derigs, U. and Marzban, S. 2008. “Review and analysis of current Shariah-compliant equity screening practices”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1 No. 4, pp. 285-303.
- Grais, W. and Pellegrini, M. 2006. “Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services”, *World Bank Policy Research Working Paper* No. 4054.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. “*Akuntansi Islam*” Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Ho, Catherine Soke Fun. 2012. “Syariah Accounting and Compliant Screening Practice”, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol.4, No.2/3, pp. 240-254
- Hussainey, Sherif El-Halaby Khaled, (n.d.). “*Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks*”. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 9 Iss 1 pp
- Ismail, Abdul Ghafar bin. 2006. “Does the Islamic financial system design matter?”, *Humanomics*, Vol.22, No.1, pp. 5-16
- Jaffer, S. 2009. “Islamic investments weather most of the storm in Asia, Islamic finance news”, *Takaful Report*, Vol. 6 No. 49.

- Kholis, N. 2009, "The contribution of Islamic Micro Finance Institutions in increasing social welfare in Indonesia", Abridged Paper, The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, Indonesia.
- Nasirwan, I. 2009, "Embracing the Islamic community- based microfinance for poverty alleviation", available at: <http://mikrobanker.wordpress.com/2009/03/20/embracing-the-islamic-community-based-microfinance-for-poverty-alleviation/> Norvadewi (2007), "Shariah consideration on the legitimacy of BMT as cooperation", Mahazib, Vol. IV No. 2, pp. 193-203.
- Rahim, Abdul dan Abdul Rahman,"Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges" Makalah dipresentasikan pada International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November 2008
- Republika. 2007, "BMTs' asset is predicted to reach 1.98 billions IDR", available at: [www.sebi.ac.id/index.php?Itemid%2F446&id%2F254&option%2Fcom\\_content&task%2Fview](http://www.sebi.ac.id/index.php?Itemid%2F446&id%2F254&option%2Fcom_content&task%2Fview)
- Republika Newsroom. 2009., "Islamic Banks are encouraged to establish BMT like Muamalat Bank establishes BMT share", available at: [www.berkahmadani.co.id/index.php?option%2Fcom\\_content&view%2Farticle&id%2F78:bank-syariah-didorong-untuk-bentuk-bmt-seperti-bmt-shar-e&catid%2F36:news-microfinance&Itemid%2F418](http://www.berkahmadani.co.id/index.php?option%2Fcom_content&view%2Farticle&id%2F78:bank-syariah-didorong-untuk-bentuk-bmt-seperti-bmt-shar-e&catid%2F36:news-microfinance&Itemid%2F418) (accessed January 27, 2010).
- Scott , William R. 2003. "*Financial Accounting Theory*".Prentice Hall,.
- Seibel, H.D. 2008, "Islamic microfinance in Indonesia: the challenge of institutional diversity, regulation, and supervision", Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 23 No. 1, pp. 86-103.
- Shaikh, Salman Ahmed. 2017, "Poverty alleviation through financing microenterprises with equity finance ", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8, Iss 1 pp. –
- Soemitra. 2009. Islamic Banks and Islamic Financial Institutions, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Wardiwiyono, Sartini. 2012 "Internal Control System For Islamic Micro Financing, an Exploratory Study of Baitul Maal Wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.5, No.4, pp. 340-352